

# **BAB V** **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

---

Arah Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Besar kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah amat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Anggaran yang berimbang dapat menjamin stabilitas perekonomian, dibanding anggaran *defisit* ataupun *surplus*. Karena itu, realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah perlu dipantau, dikontrol dan dievaluasi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bidang keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi daerah dan optimalisasi penerimaan PAD, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas serta pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, sistematis, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penciptaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta demi mewujudkan roda pemerintahan yang berjalan baik (*Good Governance*), oleh pemerintah pusat telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana Peraturan Pemerintah tersebut mengisyaratkan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Kebijakan dalam pengelolaan pendapatan atau penerimaan daerah harus mencerminkan kebijakan dalam pembiayaan daerah yang akan membebani masyarakat khususnya yang melalui pajak, retribusi daerah, dana perimbangan serta pinjaman. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, diperlukan kebijakan yang betul-betul dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang terhadap struktur dan kondisi wajib pajak dan retribusi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah secara intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyederhanaan, penyempurnaan sistem dan prosedur serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penegakan sanksi hukum bagi para penghindar wajib pajak. Disamping itu, untuk jangka pendek, perlu penyesuaian peraturan daerah yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Sedangkan secara ekstensifikasi, dapat dilakukan melalui penggalan potensi yang ada namun dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus tetap berpikir arif dan bijaksana agar tidak semakin membebani masyarakat.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah melalui program kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga, dimana untuk mendukungnya di sisi lain sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan pada akhirnya dapat kembali dinikmati dan dirasakan manfaatnya.

## **A.1. ANALISA DAN PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Sumber pendapatan atau penerimaan daerah salah satu komponennya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD/BUMN, penerimaan

---

dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan komponen lain penerimaan daerah bersumber dari Dana Perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan dan bantuan-bantuan DAU/DAK), Penerimaan Lainnya yang Sah serta Penerimaan Pinjaman Daerah. Kabupaten Kapuas Hulu selama periode lima tahun terakhir, sumber penerimaannya berasal dari sumber penerimaan PAD yang berupa pajak, retribusi, laba badan usaha dan penerimaan lain-lain PAD, penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan lainnya yang sah, serta penerimaan daerah lainnya.

Nilai Penerimaan Daerah Kapuas Hulu dalam 5 tahun terakhir, seperti yang telah diuraikan dalam bab II sebelumnya, menunjukkan angka peningkatan yang cukup tinggi. Perkembangan volume APBD selama periode tersebut, menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan APBD yakni sebesar 297%, dimana pada tahun 2000 jumlah realisasinya hanya sebesar Rp 65,92 miliar, sedangkan tahun anggaran 2004 jumlahnya mencapai angka Rp 251,25 miliar. Penerimaan Daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup baik meskipun masih terjadi fluktuasi tiap tahunnya. Kecuali tahun anggaran 2002-2003, penerimaan daerah dari PAD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 631.7% atau jika dihitung rata-rata secara keseluruhan dari periode selama lima tahun terakhir, terlihat persentasenya masih cukup tinggi, yakni sebesar 278,62% pertahun.

Dari total Realisasi PAD Kabupaten Kapuas Hulu selama periode tahun 2000 hingga 2004, kontribusi terbesar bersumber dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan total penerimaan selama 5 tahun sebesar Rp 37,12 miliar atau 85,7% dari total penerimaan PAD keseluruhan. Sementara pos lainnya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 8,7% dari penerimaan Retribusi, 3,04% dari Pajak Daerah dan sekitar 2,5% disumbangkan dari Laba Badan usaha.

Besarnya penerimaan pajak daerah di kabupaten Kapuas Hulu secara umum menunjukkan kontribusi yang masih relatif kecil, meskipun terjadi kenaikan penerimaan tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2004 tercatat pendapatan asli daerah dari hasil pajak mengalami kenaikan dibanding tahun 2000 sebelumnya, yakni sebesar Rp 146.816.000,- atau naik sebesar 93,97%. Sementara dari penerimaan retribusi daerah, seperti halnya penerimaan pajak, juga mengalami peningkatan penerimaan untuk tahun anggaran 2004. Jika pada tahun 2000 penerimaan retribusi sebesar Rp 255.604.000,-, maka pada tahun 2004 tercatat penerimaannya sebanyak Rp 794.106.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 210,68%.

Salah satu kelemahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan sumber-sumber PAD Kabupaten Kapuas Hulu selama ini adalah belum terdapatnya *Data Base* PAD sehingga penetapan sasaran pembinaan dan penetapan target penerimaan tidak dapat dilakukan berdasarkan potensi masing-masing sumber penerimaan PAD. Selain itu, karena ketiadaan *Data Base* ini menyebabkan skala prioritas pengelolaan belum dapat dilakukan sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan tidak dapat diukur. Padahal khususnya jika menyangkut pajak dan retribusi, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kelayakannya.

Pada tahun anggaran 2004, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kapuas Hulu dalam rangka peningkatan PAD adalah kegiatan Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sumber-sumber PAD, mulai dari kegiatan perencanaan, pendataan, penetapan, pemungutan hingga pembukuan sumber-sumber penerimaan PAD terutama sumber-sumber yang berasal dari pajak dan retribusi. Diharapkan melalui sistem ini untuk kedepannya diperoleh peningkatan angka penerimaan disamping menumbuhkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tabel : 61

## SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS / SUMBER PAD	DASAR HUKUM PEMUNGUTAN	
<b>PAJAK DAERAH</b>			
1	Pajak Reklame	PERDA No.4 Tahun 1987	tentang Pajak Reklame
2	Pajak Hotel	PERDA No.3 Tahun 1988	tentang Pajak Hotel dan Restoran
3	Pajak Restoran	PERDA No.3 Tahun 1988	tentang Pajak Hotel dan Restoran
4	Pajak Hiburan	PERDA No.2 Tahun 1988	tentang Pajak Hiburan
5	Pajak Penerangan Jalan	PERDA No.7 Tahun 1988	tentang Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C	PERDA No.5 Tahun 1988	tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol.C
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
1	Retribusi Pelayanan Pasar	PERDA No.4 Tahun 1999	tentang Retribusi Pasar
2	Pengolahan Air Baku	PERDA No.3 Tahun 2002	tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Kapuas Hulu
3	Keindahan dan Kebersihan Kota	PERDA No.4 Tahun 1991	tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan Kota
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	PERDA No.15 Tahun 2001	tentang Retribusi IMB
5	Parkir Jalan Umum	PERDA No.5 Tahun 1999	tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	PERDA No.8 Tahun 1999	tentang Izin Trayek
7	Terminal	PERDA No.7 Tahun 1999	tentang Retribusi Terminal
8	Tempat Khusus Parkir	PERDA No.6 Tahun 1999	tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
9	Izin Trayek	PERDA No.8 Tahun 1999	tentang Retribusi Izin Trayek
10	Izin Operasi Alat Berat	PERDA No.4 Tahun 1984	tentang Izin Usaha Angkutan Umum
11	Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK	PERDA No.12 Tahun 2000	tentang Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
12	Kutipan-Kutipan Akte Perkawinan dan Perceraian	PERDA No.12 Tahun 2000	tentang Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
13	Kutipan Akte Kelahiran	PERDA No.12 Tahun 2000	tentang Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
14	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	( Sedang dalam Pembahasan DPRD )	
15	Perijinan Usaha Perikanan	( Sedang dalam Pembahasan DPRD )	
16	Pelayanan Kesehatan	PERDA No.3 Tahun 1989	tentang Biaya Pelayanan Kesehatan dan RSU / Khusus / Puskesmas, Rawat Tinggal, Puskesmas Pembantu dan Balau Pengobatan Khusus
17	Hasil Hutan Ikutan : a. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet b. Izin Pengelolaan Hasil Hutan Lainnya	PERDA No.9 Tahun 1999	tentang Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
18	Izin Usaha Pertambangan Milik Rakyat	PERDA No.5 Tahun 2003	tentang Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu
19	Pembuatan Badan Hukum Koperasi	( Sedang dalam Proses Pembuatan )	
20	Registrasi Ulang Badan Hukum Koperasi	( Sedang dalam Proses Pembuatan )	
21	Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan : a. Penerbitan dan Registrasi Ulang SITU b. Penerbitan dan Registrasi Ulang SILUP c. Penerbitan dan Registrasi Ulang TDP d. Penerbitan dan Registrasi TDG e. Izin Pameran Perdagangan dan Industri	( Sedang dalam Proses Penetapan )	
22	Pemberian Rekomendasi HPHH	( Sedang dalam Proses Penyusunan )	
23	Tambat Motor Air		
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>			
1	Sewa Peralatan Milik Pemda : a. Sewa ALat Berat b. Sewa Rumah Milik Pemda c. Sewa Peralatan Milik Pemda Lainnya	PERDA No.9 Tahun 1980	tentang Sewa Menyewa Peralatan Milik Pemda Kapuas Hulu
2	Lain-Lain Pendapatan (UUDP) : a. Sisa Perhitungan Anggaran b. Jasa Giro Kas Daerah	( Sedang dalam Proses Pembuatan )	
3	Penerimaan Dinas-Dinas : a. Penjualan Bibit Salak b. Penjualan Bibit Durian c. Penjualan Bibit Mangga d. Penjualan Bibit Ikan		
4	Sumbangan Pihak Ketiga : a. Pos Badau b. Pos Nanga Silat c. Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi	PERDA No.2 Tahun 1999	tentang Penerimaan SP3 Kepala Daerah
5	Hasil Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti atas Kekayaan Daerah	PERDA No.5 Tahun 2003	tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kab. Kapuas Hulu
6	Hasil Penjualan Barang Milik Pemerintah Daerah	PERDA No.1 Tahun 2002	tentang Penghapusan Barang Milik Pemda
7	Penerimaan Sewa Beli Kendaraan Roda Dua	PERDA No.4 Tahun 1999	tentang Retribusi Pasar

Sumber : Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Hingga tahun 2004, sumber-sumber PAD Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 6 (enam) jenis pajak daerah, 23 (dua puluh tiga) jenis retribusi dan 7 (tujuh) jenis lain-lain sumber PAD yang sah.

Jika melihat hasil rekapitulasi potensi, target dan realisasi PAD Kabupaten Kapuas Hulu antara tahun anggaran 2001 dan 2004 terakhir, belum seluruh potensi sumber PAD yang dapat dioptimalkan untuk dijadikan target penerimaan daerah saat ini. Tercatat masih sekitar 10 hingga 20 sumber PAD yang potensial belum digarap untuk direalisasikan hingga tahun 2004. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi sumber PAD khususnya dari jenis pajak mengalami peningkatan pada tahun 2004 dibanding potensi pajak pada tahun 2001. Sedangkan potensi sumber PAD dari jenis retribusi cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya belum maksimal dan belum akuratnya pengidentifikasian potensi beberapa sumber retribusi yang ada, seperti Retribusi

Keindahan dan Kebersihan Kota, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Izin Trayek, Izin Operasi Alat Berat serta Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Disamping itu, beberapa jenis retribusi belum dapat dilaksanakan karena dasar hukum pemungutannya baru ditetapkan pada tahun 2004 dan baru bisa efektif dijalankan pada tahun anggaran 2005, seperti Retribusi Penerbitan dan Registrasi Ulang SIUP, TDP, TDG dan Restribusi Izin Pameran Perdagangan dan Industri.

Tabel : 62

**REKAPITULASI POTENSI, TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001 DAN 2004**

NO	JENIS / SUMBER PAD	TAHUN / JUMLAH ( Rp x 1.000,- )					
		2001			2004		
		POTENSI	TARGET	REALISASI	POTENSI	TARGET	REALISASI
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>329.125</b>	<b>344.863</b>	<b>314.047</b>	<b>581.537</b>	<b>572.093</b>	<b>303.056</b>
1	Pajak Reklame	37.550	55.000	67.755	78.150	80.000	37.283
2	Pajak Hotel	12.000	5.000	61.100	15.000	10.000	66.105
3	Pajak Restoran	15.500	15.000	1.600	35.500	10.000	4.725
4	Pajak Hiburan	8.400	12.500	6.690	7.200	10.000	7.835
5	Pajak Penerangan Jalan	53.312	55.000	3.510	63.594	80.000	0
6	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C	200.000	200.000	171.028	250.000	250.000	55.015
	Pajak Lain-Lain	2.363	2.363	2.363	132.093	132.093	132.093
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>5.058.804</b>	<b>1.046.228</b>	<b>786.423</b>	<b>4.065.717</b>	<b>1.066.044</b>	<b>794.106</b>
1	Retribusi Pelayanan Pasar	3.200	20.000	17.125	32.500	25.000	19.230
2	Pengolahan Air Baku	15.012	0	0	17.967	15.000	0
3	Keindahan dan Kebersihan Kota	0	775	890	8.160	5.000	1.000
4	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	844.460	20.000	23.155	936.100	35.000	26.607
5	Parkir Jalan Umum	22.273	15.000	55.863	65.466	35.000	17.554
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	21.165	20.000	11.840
7	Terminal	15.800	18.000	5.264	15.200	30.000	11.552
8	Tempat Khusus Parkir	0	3.000	5.000	0	0	0
9	Izin Trayek	5.554	3.000	5.554	9.874	5.000	4.542
10	Izin Operasi Alat Berat	23.000	0	0	0	0	0
11	Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK	56.476	90.000	33.390	65.436	60.000	35.411
12	Kutipan-Kutipan Akte Perkawinan dan Perceraian	2.258	0	0	2.900	5.000	7.592
13	Kutipan Akte Kelahiran	0	0	0	2.505	10.000	20.603
14	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0	0	4.023	50.000	4.023
15	Perijinan Usaha Perikanan	46.650	0	0	57.050	50.000	0
16	Pelayanan Kesehatan	298.689	90.000	115.363	495.928	550.000	416.868
17	Hasil Hutan Iktutan :						
	a. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet	3.072.480	600.000	1.041	2.085.600	0	75.000
	b. Izin Pengelolaan Hasil Hutan Lainnya	0	0	0	0	0	0
18	Izin Usaha Pertambangan Milik Rakyat	124.500	0	0	104.700	10.000	0
19	Pembuatan Badan Hukum Koperasi	0	0	0	3.250	10.000	5.050
20	Registrasi Ulang Badan Hukum Koperasi	0	0	0	1.850	15.000	2.263
21	Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan :						
	a. Penerbitan dan Registrasi Ulang SITU	0	0	0	0	0	0
	b. Penerbitan dan Registrasi Ulang SIUP	0	0	0	0	0	0
	c. Penerbitan dan Registrasi Ulang TDP	0	0	0	0	0	0
	d. Penerbitan dan Registrasi TDG	0	0	0	0	0	0
	e. Izin Pameran Perdagangan dan Industri	0	0	0	0	0	0
22	Pemberian Rekomendasi HPHH	340.000	0	340.000	0	0	0
23	Tambat Motor Air	7.000	5.000	2.325	10.000	10.000	8.928
	Retribusi Lain-Lain	181.453	181.453	181.453	126.044	126.044	126.044
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.708.909</b>	<b>8.719.173</b>	<b>8.521.576</b>	<b>4.992.064</b>	<b>4.102.362</b>	<b>4.705.089</b>
1	Sewa Peralatan Milik Pemda :						
	a. Sewa ALat Berat	176.450	190.000	176.450	200.000	100.000	200.000
	b. Sewa Rumah Milik Pemda	191.940	4.500	4.607	91.770	50.000	26.728
	c. Sewa Peralatan Milik Pemda Lainnya	0	0	0	0	0	0
2	Lain-Lain Pendapatan (UUDP) :						
	a. Sisa Perhitungan Anggaran	198.831	362.985	198.831	1.744.051	750.000	1.744.051
	b. Jasa Giro Kas Daerah	0	10.000	0	729.130	643.932	729.130
3	Penerimaan Dinas-Dinas :						
	a. Penjualan Bibit Salak	0	0	0	7.500	5.000	7.500
	b. Penjualan Bibit Durian	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	c. Penjualan Bibit Mangga	0	0	0	0	5.000	0
	d. Penjualan Bibit Ikan	0	0	0	0	0	0
4	Sumbangan Pihak Ketiga :						
	a. Pos Badau	0	0	0	745.000	1.000.000	739.067
	b. Pos Nanga Silat	0	0	0	6.000	0	0
	c. Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi	0	0	0	210.000	0	0
5	Hasil Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti atas Kekayaan Daerah	0	0	0	0	50.000	0
6	Hasil Penjualan Barang Milik Pemerintah Daerah	0	10.000	0	120.183	150.000	120.183
7	Penerimaan Sewa a Beli Kendaraan Roda Dua	0	0	0	210.000	210.000	0
8	Lain-Lain	8.141.688	8.141.688	8.141.688	1.133.430	1.133.430	1.133.430
	<b>TOTAL</b>	<b>14.096.838</b>	<b>10.110.264</b>	<b>9.622.045</b>	<b>9.639.319</b>	<b>5.740.499</b>	<b>5.802.251</b>

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Peningkatan potensi pajak daerah secara umum mengalami peningkatan, hanya potensi dari jenis pajak hiburan yang relatif menurun jika melihat data pada **tabel 62** di atas. Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa penyebab, diantaranya karena pada dasarnya Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini tidak atau belum memiliki objek hiburan yang cukup potensial dan dikelola secara maksimal, sementara sebagian objek lainnya masih bersifat sangat temporer, seperti Rental atau penyewaan VCD dan Playstation serta masih banyaknya tempat-tempat hiburan saat ini yang keberadaannya masih relatif liar seperti tempat-tempat karaoke, billiard dan kafe-kafe.

Dalam rangka pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada hakekatnya dapat dievaluasi berdasarkan beberapa tolok ukur atau parameter yang umum digunakan, diantaranya adalah :

- a. **Hasil (Yield)**, parameter ini dapat dilihat dari memadai atau tidak hasil sumber PAD dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan yang dibiayainya. Kriteria ini mencakup stabilitas penerimaan, mudah tidaknya memperkirakan besaran hasil, elastisitas hasil terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan lain-lain serta perbandingan hasil dengan biaya pungut.
- b. **Keadilan (Equity)**, parameter ini meliputi landasan hukum yang mendasari sistem pemungutan dan kewajiban membayar, dimana harus jelas dan adil baik menyangkut kepentingan secara horizontal maupun vertikal
- c. **Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)**, parameter ini menyangkut sumber daya PAD yang hendaknya mampu mendorong penggunaannya secara efisien atau berdaya guna dalam kehidupan ekonomi serta mampu mencegah baik konsumen maupun produsen menjadi salah arah, seperti misalnya menjadikan orang untuk enggan bekerja/menabung atau sebaliknya memperkecil beban pungutan dari yang seharusnya.
- d. **Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement)**, parameter ini menunjukkan dimana pungutan haruslah dapat dilaksanakan baik dilihat dari kemampuan politis maupun ketatausahaan.
- e. **Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source)**, parameter ini mencakup ketentuan bahwa pungutan tidak mudah dihindari, tidak mempertajam perdebatan antar kelompok/golongan jika dilihat dari aspek ekonomi masing-masing kelompok serta tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha sumber penerimaan yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk mengetahui Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan sumber PAD, kemudian besarnya Kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah, dan baik atau tidaknya Sistem Perencanaan Penerimaan serta Tingkat Responsif PAD terhadap PDRB, maka dapat digunakan formula-formula sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Sumber PAD}}{\text{Potensi Sumber PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Sumber PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Sumber PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{PAD Elasticity} = \frac{\text{Pertumbuhan Penerimaan PAD}}{\text{Pertumbuhan PDRB}} \times 100\%$$

Apabila mengacu pada Sistem Manajemen dan Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) yang diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tingkat Pemungutan, Tingkat Cakupan dan Tingkat Penilaian dapat dikatakan ideal apabila mencapai angka 95% serta dilaksanakan secara konseptual dan terpadu dengan menerapkan prinsip *Cost Recovery*. Kondisi ideal ini walaupun sulit untuk dicapai namun bukan suatu hal yang mustahil.

Selanjutnya berdasarkan rumus dan persamaan-persamaan di atas, hasil evaluasi pengelolaan sumber-sumber PAD dapat dilihat pada **tabel 63** hingga **tabel 68**.

**Tabel : 63**  
**EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

NO	TAHUN	POTENSI PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	TINGKAT EFEKTIFITAS (%)	TINGKAT PERTUMBUHAN PAD (%)
1	2001	14.096.838.000,00	9.622.045.000,00	68,26	-
2	2002	27.467.233.000,00	21.807.536.000,00	79,39	126,64
3	2003	10.102.372.000,00	5.548.254.000,00	54,92	-74,56
4	2004	9.639.319.000,00	5.802.251.000,00	60,19	4,58
<b>RATA-RATA</b>		<b>15.326.440.500,00</b>	<b>10.695.021.500,00</b>	<b>65,69</b>	<b>18,89</b>

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Dari **tabel 63**, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efektifitas pengelolaan PAD Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2001-2004 adalah 65,69%. Dari angka tersebut mencerminkan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan PAD Kapuas Hulu hingga saat ini secara umum dapat dikatakan belum begitu maksimal, hal ini disimpulkan apabila mengacu pada manajemen SISMIOP PBB yang menetapkan standard minimal 95%. Namun demikian, dengan persentase pada tingkat efektifitas PAD yang diperoleh selama ini kiranya cukup terbuka untuk lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang dengan asumsi pelaksanaan pengelolaan PAD dapat lebih ditingkatkan pula khususnya dalam mengidentifikasi seluruh sumber-sumber PAD yang ada secara terpadu, akurat dan terencana dengan baik.

**Tabel : 64**  
**EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

NO	TAHUN	REALISASI PAD (Rp)	REALISASI BIAYA PEMUNGUTAN PAD (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)	TINGKAT MARGINAL PENDAPATAN (%)
1	2001	9.622.045.000,00	1.689.232.500,00	17,56	82,44
2	2002	21.807.536.000,00	2.016.466.000,00	9,25	90,75
3	2003	5.548.254.000,00	2.028.818.000,00	36,57	63,43
4	2004	5.802.251.000,00	2.552.742.000,00	44,00	56,00
<b>RATA-RATA</b>		<b>10.695.021.500,00</b>	<b>2.071.814.625,00</b>	<b>26,84</b>	<b>97,54</b>

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Sementara berdasarkan tolok ukur Efisiensi PAD, seperti yang digambarkan pada **tabel 64**, pengelolaan PAD Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2001-2004 menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi yang relatif cukup baik. Sebaliknya jika dilihat dari rentabilitas marginal pendapatan PAD terhadap komponen biaya-biaya pemungutan rata-rata cukup tinggi, yakni mencapai 97,54%. Jika mengacu pada SISMIOP PBB yang menetapkan kriteria bahwa pengelolaan PAD dapat dikatakan efisien apabila biaya pengelolaan tidak lebih besar dari 20%

maka meskipun pencapaian rata-rata tingkat efisiensi PAD Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2001-2004 lebih besar dari 20% yakni sebesar 26,84% namun dapat dikatakan tidaklah begitu buruk, seperti halnya dari hasil evaluasi tingkat efektifitas, yang mana dimasa periode-periode berikutnya terbuka peluang untuk lebih ditingkatkan kembali baik melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun melalui upaya-upaya penekanan dan pengawasan terhadap komponen biaya-biaya operasional pemungutan.

**Tabel : 65**  
**KONTRIBUSI PAD TERHADAP TOTAL PENERIMAAN APBD**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

NO	TAHUN	REALISASI PAD ( Rp )	REALISASI APBD ( Rp )	KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD ( % )
1	2001	9.622.045.000,00	156.120.760.000,00	6,16
2	2002	21.807.536.000,00	213.961.547.000,00	10,19
3	2003	5.548.254.000,00	296.537.244.000,00	1,87
4	2004	5.802.251.000,00	265.580.773.000,00	2,18
<b>RATA-RATA</b>		<b>10.695.021.500,00</b>	<b>233.050.081.000,00</b>	<b>5,10</b>

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Parameter evaluasi pengelolaan PAD selanjutnya adalah tingkat atau persentase kontribusi PAD terhadap APBD dan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Selama periode 2001-2004, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 5,10% (terhadap APBD) dan 1,56% (terhadap PDRB), menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dan manfaat PAD terhadap APBD dan pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih sangat rendah/kecil. Hal ini menggambarkan pula bahwa tingkat kemandirian daerah Kapuas Hulu dalam hal keseimbangan keuangan daerah masih cukup rendah. Jelas dibutuhkan kerja yang lebih keras lagi dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah agar dalam penetapan program-program kerja selanjutnya lebih berorientasi pada upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi PAD sebagai modal sekaligus penunjang utama kegiatan pembangunan daerah dan juga perlu melakukan terobosan-terobosan atau langkah-langkah strategis yang inovatif sehingga manfaat baik langsung maupun tidak langsung dapat mendukung tujuan pembangunan daerah yang dicanangkan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adil dan merata.

**Tabel : 66**  
**RATIO PAD TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

NO	TAHUN	REALISASI PAD ( Rp )	PROYEKSI PDRB ( Rp )	RATIO PAD TERHADAP PDRB ( % )
1	2001	9.622.045.000,00	650.294.340.000,00	1,48
2	2002	21.807.536.000,00	686.711.410.000,00	3,18
3	2003	5.548.254.000,00	709.727.670.000,00	0,78
4	2004	5.802.251.000,00	734.492.350.000,00	0,79
<b>RATA-RATA</b>		<b>10.695.021.500,00</b>	<b>695.306.442.500,00</b>	<b>1,56</b>

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

**Tabel : 67**  
**ELASTISITAS PAD TERHADAP PDRB HARGA KONSTAN 1993**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2001-2004**

NO	TAHUN	PERTUMBUHAN PAD ( % )	PERTUMBUHAN PDRB ( % )	ELASTISITAS PAD TERHADAP PDRB
1	2001	-	-	-
2	2002	126,64	5,67	2.233,53
3	2003	-74,56	3,35	-2.225,61
4	2004	4,58	3,49	131,17
<b>RATA-RATA</b>		<b>18,89</b>	<b>4,17</b>	<b>46,36</b>

*Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004*

Dari **tabel 67** dapat dilihat tingkat elastisitas atau tingkat kepekaan PAD terhadap PDRB yang relatif cukup baik. Dengan rata-rata pertumbuhan PAD yang masih di atas pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa tingkat responsif PAD terhadap dinamika perekonomian masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2001-2004 sudah memasuki jalur yang positif. Meskipun tidak ada kriteria pada tingkatan berapa elastisitas ini dapat dikatakan baik, namun secara umum ukurannya adalah makin besar angka elastisitas penilaiannya adalah semakin baik.

**Tabel : 68**  
**PROYEKSI / PERKIRAAN PERTUMBUHAN PAD**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2005-2010**

NO	TAHUN	PERKIRAAN PAD	
		NILAI / JUMLAH ( Rupiah )	PERTUMBUHAN ( % )
1	2004	5.802.251.000,00	
2	2005	6.667.366.624,00	14,91
3	2006	7.532.790.811,80	12,98
4	2007	8.398.308.476,07	11,49
5	2008	9.263.334.249,11	10,30
6	2009	10.128.529.667,97	9,34
7	2010	10.993.506.101,62	8,54
<b>RATA-RATA</b>		<b>8.398.012.418,65</b>	<b>11,26</b>

*Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004*

Analisa terakhir yang dapat dikemukakan di sini adalah proyeksi pertumbuhan PAD Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode lima tahun mendatang. Angka-angka proyeksi seperti yang digambarkan pada **tabel 68** di atas pada dasarnya adalah merupakan angka-angka perkiraan yang rasional untuk dapat diupayakan pencapaiannya pada tahun-tahun yang bersangkutan. Angka tersebut dapat dijadikan sebagai target pencapaian dengan asumsi kondisi pengelolaan PAD pada periode-periode selanjutnya dapat lebih ditingkatkan dibanding kondisi yang telah berjalan selama ini.

## **A.2. PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2004 berjumlah 200.652 jiwa yang berarti mengalami peningkatan sebesar 3,63% dibanding jumlah penduduk pada tahun 2003 yang tercatat sebanyak 193.616 jiwa. Sementara jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk selama periode 2000-2004, maka dapat dihitung rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun berdasarkan data jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 184.501 jiwa, yang berarti rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 2,13% pertahun. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada **tabel 69**, dapat diperkirakan jumlah penduduk dan rata-rata kepadatannya untuk 5 (tahun) mendatang (2005-2009).

**Tabel : 69**  
**PERKIRAAN JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2005-2010**

NO	TAHUN	PERKIRAAN	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-Rata Kepadatan (jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	2005	204.926	6,87
2	2006	209.093	7,01
3	2007	213.508	7,15
4	2008	217.023	7,27
5	2009	219.538	7,36
6	2010	224.043	7,51

### A.3. PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan oleh suatu daerah sebagai balas jasa dari seluruh kegiatan ekonominya.

Selama tahun 2000-2004, kondisi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada **tabel 70** dan **tabel 71**. Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2000, secara riil diperoleh gambaran mengenai pencapaian tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi daerah. Pada tahun 2000 tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 3,62% dan pada tahun 2004 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,49% yang secara sektoral penurunan tersebut hampir terjadi pada seluruh sektor, kecuali sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami kenaikan laju pertumbuhan dimana pada tahun 2000 laju pertumbuhannya sebesar 4,15% dan pada tahun 2004 naik menjadi 6,86%. Sektor yang paling tinggi persentase penurunan laju pertumbuhannya adalah dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang mengalami penurunan hingga 4,88%, dimana pada tahun 2000 tercatat laju pertumbuhannya sebesar 6,60% sedangkan tahun 2004 tercatat hanya sebesar 1,72%.

**Tabel : 70**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2000 - 2004 ( Jutaan Rupiah )**

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB ( Jutaan Rupiah )					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2000	2001	2002	2003	2004	
1	PERTANIAN	321.346,92	341.281,62	381.032,73	402.142,55	406.338,90	6,11
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	10.886,86	13.199,83	15.500,00	16.385,16	16.903,42	11,89
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	12.343,13	15.499,62	18.567,23	19.774,08	19.946,49	13,18
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1.634,15	1.790,62	1.979,48	2.168,33	2.357,19	9,59
5	BANGUNAN	44.267,40	50.110,72	57.658,41	60.671,70	66.191,22	10,65
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	141.648,00	162.274,02	185.795,28	194.165,37	212.167,63	10,71
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	13.225,96	15.878,92	18.453,86	19.509,39	20.176,79	11,35
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	37.905,96	43.392,84	49.076,08	51.854,95	55.004,64	9,83
9	JASA-JASA	51.750,79	62.038,96	72.142,59	75.381,97	78.553,06	11,22
<b>JUMLAH</b>		<b>635.009,17</b>	<b>705.467,15</b>	<b>800.205,66</b>	<b>842.053,50</b>	<b>877.639,34</b>	<b>8,50</b>

**Tabel : 71**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000**  
**Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2000 - 2004 ( Jutaan Rupiah )**

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB ( Jutaan Rupiah )					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2000	2001	2002	2003	2004	
1	PERTANIAN	321.346,92	326.672,31	335.730,88	341.747,12	347.006,70	1,94
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	10.886,86	11.414,16	11.800,23	12.280,45	12.737,14	4,00
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	12.343,13	12.421,10	13.541,21	13.966,56	14.565,60	4,27
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1.634,15	1.751,95	1.903,69	2.018,29	2.052,92	5,90
5	BANGUNAN	44.267,40	45.981,15	46.848,54	48.280,17	49.570,74	2,87
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	141.648,00	144.669,89	165.474,91	174.458,17	186.422,13	7,20
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	13.226,96	12.295,18	12.288,07	12.877,90	13.219,49	0,09
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	37.905,96	40.666,48	41.928,00	44.197,66	46.293,73	5,14
9	JASA-JASA	51.750,79	54.422,13	57.195,88	59.901,36	62.623,90	4,88
<b>JUMLAH</b>		<b>635.010,17</b>	<b>650.294,35</b>	<b>686.711,41</b>	<b>709.727,68</b>	<b>734.492,35</b>	<b>3,71</b>

**Tabel : 72**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000**  
**Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2000 - 2004**

NO	LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN ( % )					RATA-RATA
		2000	2001	2002	2003	2004	
1	PERTANIAN	2,27	1,66	2,77	1,79	1,54	1,94
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5,97	4,84	3,38	4,07	3,72	4,00
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5,99	0,63	9,02	3,14	4,29	4,27
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	6,60	7,21	8,66	6,02	1,72	5,90
5	BANGUNAN	4,16	3,87	1,89	3,06	2,67	2,87
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	4,15	2,13	14,38	5,43	6,86	7,20
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	6,04	-7,04	-0,06	4,80	2,65	0,09
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	5,32	7,28	3,10	5,41	4,74	5,14
9	JASA-JASA	5,63	5,16	5,10	4,73	4,55	4,88
<b>JUMLAH</b>		<b>3,62</b>	<b>2,41</b>	<b>5,60</b>	<b>3,35</b>	<b>3,49</b>	<b>3,71</b>

Selanjutnya sesuai dengan kondisi pertumbuhan PDRB selama tahun 2000-2004 tersebut, maka dapat diperkirakan angka-angka PDRB Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun mendatang, seperti yang digambarkan pada **tabel 73** dan **tabel 74**.

**Tabel : 73**  
**PERKIRAAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2005 - 2010 ( Jutaan Rupiah )**

NO	LAPANGAN USAHA	PERKIRAAN PDRB ( Jutaan Rupiah )						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	PERTANIAN	421.220,26	447.350,59	499.456,18	527.126,85	532.627,41	552.133,84	5,29
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	17.750,74	21.521,97	25.272,34	26.715,57	27.560,58	28.942,11	9,60
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	20.847,05	26.178,24	31.359,31	33.397,63	33.688,83	35.209,85	10,29
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2.664,44	2.919,56	3.227,49	3.535,40	3.843,34	4.344,30	10,74
5	BANGUNAN	74.765,87	84.635,01	97.382,76	102.472,08	111.794,33	126.276,58	11,42
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	239.237,83	274.074,35	313.800,83	327.937,57	358.342,67	404.063,16	11,39
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	21.260,86	25.525,52	29.664,76	31.361,53	32.434,38	34.177,03	9,36
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	61.804,67	70.750,88	80.017,25	84.548,13	89.683,61	100.770,88	10,67
9	JASA-JASA	82.894,76	99.374,42	115.558,48	120.747,34	125.826,81	132.781,38	9,32
<b>JUMLAH</b>		<b>942.446,48</b>	<b>1.052.330,54</b>	<b>1.195.739,40</b>	<b>1.257.842,12</b>	<b>1.315.801,97</b>	<b>1.418.699,12</b>	<b>8,38</b>

**Tabel : 74**  
**PERKIRAAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000**  
**Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2005 - 2010 ( Jutaan Rupiah )**

NO	LAPANGAN USAHA	PERKIRAAN PDRB ( Jutaan Rupiah )						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	PERTANIAN	351.993,73	361.387,56	371.408,78	381.070,92	390.785,90	398.764,06	2,35
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	13.373,38	13.963,55	14.675,38	15.398,79	16.236,46	17.401,82	5,34
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	14.914,11	15.533,61	16.249,55	17.050,75	17.904,84	18.523,43	4,09
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2.143,15	2.219,14	2.328,96	2.452,05	2.618,51	2.695,84	4,65
5	BANGUNAN	51.008,51	52.983,23	54.839,63	56.872,62	59.133,24	61.619,88	3,69
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	198.757,55	208.254,42	223.455,48	241.686,87	263.260,91	286.114,39	7,41
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	13.560,12	13.854,52	14.266,07	14.802,81	15.500,89	16.059,31	3,30
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	48.853,20	51.242,21	54.036,80	57.933,60	62.065,13	66.990,43	6,36
9	JASA-JASA	65.407,21	68.115,56	70.892,07	73.524,44	76.119,74	78.730,85	3,89
<b>JUMLAH</b>		<b>760.010,95</b>	<b>787.553,78</b>	<b>822.152,72</b>	<b>860.792,85</b>	<b>903.625,63</b>	<b>946.900,01</b>	<b>4,33</b>

Sesuai dengan perkiraan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 tersebut di atas, maka dapat dihitung pula angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2005-2009 mendatang, seperti yang ditunjukkan pada **tabel 75**.

Tabel : 75  
**PERKIRAAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000**  
 Menurut Lapangan Usaha TAHUN 2005 - 2010 ( % )

NO	LAPANGAN USAHA	PERKIRAAN PERTUMBUHAN ( % )						RATA-RATA
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	PERTANIAN	1,44	2,67	2,77	2,60	2,55	2,04	2,35
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5,00	4,41	5,10	4,93	5,44	7,18	5,34
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	2,39	4,15	4,61	4,93	5,01	3,45	4,09
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	4,39	3,55	4,95	5,29	6,79	2,95	4,65
5	BANGUNAN	2,90	3,87	3,50	3,71	3,97	4,21	3,69
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,62	4,78	7,30	8,16	8,93	8,68	7,41
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,58	2,17	2,97	3,76	4,72	3,60	3,30
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	5,53	4,89	5,45	7,21	7,13	7,94	6,36
9	JASA-JASA	4,44	4,14	4,08	3,71	3,53	3,43	3,89
<b>JUMLAH</b>		<b>3,47</b>	<b>3,62</b>	<b>4,39</b>	<b>4,70</b>	<b>4,98</b>	<b>4,79</b>	<b>4,33</b>

Berdasarkan analisa struktur perekonomian daerah, selama tahun 2000-2004 terlihat bahwa sektor pertanian masih tetap dominan yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan angka-angka perkiraan PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat pula dihitung perkiraan kondisi struktur ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 5 (lima) tahun mendatang berupa persentase kontribusi masing-masing sektor perekonomian, seperti yang ditunjukkan dalam **tabel 76**.

Tabel : 76  
**PERKIRAAN STRUKTUR EKONOMI**  
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2005 - 2010

NO	SEKTOR / LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI ( % )						RATA-RATA
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	PERTANIAN	46,31	45,89	45,18	44,27	43,25	42,11	44,50
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,76	1,77	1,78	1,79	1,80	1,84	1,79
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,96	1,97	1,98	1,98	1,98	1,96	1,97
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
5	BANGUNAN	6,71	6,73	6,67	6,61	6,54	6,51	6,63
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	26,15	26,44	27,18	28,08	29,13	30,22	27,87
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,78	1,76	1,74	1,72	1,72	1,70	1,73
8	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN & JASA PERUSAHAAN	6,43	6,51	6,57	6,73	6,87	7,07	6,70
9	JASA-JASA	8,61	8,65	8,62	8,54	8,42	8,31	8,53

Analisa terakhir mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang juga sangat terkait erat adalah analisa perkiraan laju inflasi dan perkiraan pendapatan per kapita Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Pada **tabel 77** ditunjukkan proyeksi tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode tahun 2005-2009. Adapun angka-angka tersebut merupakan angka perkiraan dan secara riil perkembangannya sangat tergantung dari berbagai faktor yang akan mempengaruhi selama perjalanan waktu lima tahun mendatang, seperti pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, tingkat suku bunga, tingkat harga produsen dan lain-lain. Yang paling nyata pengaruhnya pada level pasar atau produsen adalah harga bahan bakar minyak disamping harga-harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

**Tabel : 77**  
**PERKIRAAN TINGKAT DAN LAJU INFLASI**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2005 - 2009**

NO	TAHUN	TINGKAT INFLASI ( % )	LAJU INFLASI ( % )
1	2005	6,74	-
2	2006	7,23	7,25
3	2007	6,91	-4,45
4	2008	5,95	-13,84
5	2009	5,62	-5,59
RATA-RATA		6,49	-4,16

Sebagaimana diketahui bahwa angka PDRB perkapita diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai PDRB atas dasar harga pasar dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan untuk mengetahui angka pendapatan per kapita diperoleh dari hasil perbandingan PDR Netto atas dasar biaya faktor produksi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pada tahun 2000, PDRB perkapita Kabupaten Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 3.477.806,28,- dengan nilai pendapatan regional per kapitanya mencapai Rp 3.184.627,23,-. Sedangkan pada tahun 2004, PDRB perkapita yang diperoleh naik menjadi Rp 4.503.625,62,- dengan nilai pendapatan regional perkapita juga mengalami kenaikan menjadi Rp 4.163.035,66,- atau meningkat sebesar 30,72%.

Berdasarkan perkiraan angka-angka PDRB Kabupaten Kapuas Hulu yang diproyeksikan sebelumnya, maka seperti yang digambarkan pada **tabel 78**, dapat diperkirakan pula besaran PDRB dan pendapatan perkapita Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2005-2009.

**Tabel : 78**  
**PERKIRAAN PDRB DAN PENDAPATAN PER KAPITA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2005 - 2010**

NO	URAIAN	PERKIRAAN					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	PERKIRAAN PDRB ATAS HARGA BERLAKU (Jutaan Rupiah)	942.446,48	1.052.330,54	1.195.739,40	1.257.842,12	1.315.801,97	1.418.699,12
2	PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	203.901,37	208.047,54	212.440,46	215.937,89	218.440,31	222.922,79
3	PERKIRAAN PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR PRODUKSI (Jutaan Rupiah)	867.050,76	968.144,10	1.100.080,25	1.157.214,75	1.210.537,81	1.347.063,49
4	PERKIRAAN PDRB PER KAPITA (Rupiah)	4.622.070,36	5.058.125,48	5.628.585,99	5.825.018,23	6.023.622,52	6.364.083,06
5	PERKIRAAN PENDAPATAN PER KAPITA (Rupiah)	4.252.304,73	4.653.475,44	5.178.299,11	5.359.016,77	5.541.732,71	6.042.735,79

#### **A.4. PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH**

Jika bercermin pada kondisi dan fakta-fakta tersebut di atas sebelumnya, maka perlu dipikirkan upaya-upaya yang konkrit dan efektif khususnya dalam perencanaan dan penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengkajian dan realisasi pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik pengembangan sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber pendapatan baru.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menempatkan upaya-upaya menggali potensi PAD sebagai salah satu skala prioritas utama dalam rangka upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

---

Upaya-upaya menggali potensi PAD, sudah dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaannya akan dihadapkan kepada berbagai kekuatan penghambat disatu pihak dan kekuatan pendorong dilain pihak. Strategi umum yang diterapkan agar potensi PAD dapat digali secara optimal adalah memperkecil pengaruh kekuatan penghambat dan memperbesar pengaruh kekuatan pendorong. Idealnya strategi tersebut diterapkan terhadap seluruh kekuatan penghambat dan kekuatan pendorong yang ada. Namun hal tersebut belum seluruhnya memungkinkan oleh karena itu skala prioritas dan strategi yang lebih detail perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi masing-masing sumber penerimaan PAD yang bersangkutan.

Dari sumber pendapatan daerah yang telah direalisasikan selama ini, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirasakan masih menunjukkan kontribusi yang cukup rendah dari nilai yang disumbangkan tiap tahunnya. Penerimaan PAD yang bersumber dari pajak-pajak dan berbagai jenis retribusi serta penerimaan dari jenis PAD yang sah lainnya, biasanya telah ditargetkan pada awal tahun anggaran dan harus berdasarkan prediksi perkembangan perekonomian daerah. Terkadang target yang ditetapkan bisa tercapai, namun lebih sering terjadi pencapaian yang jauh di bawah target yang telah ditetapkan, yang umum disebabkan oleh karena berbagai faktor yang tak diantisipasi sebelumnya atau karena prediksi yang terlalu tinggi.

Data PAD Kapuas Hulu tahun 2004 menunjukkan penurunan angka yang cukup signifikan yang mana diduga penentuan target tidak didasari oleh analisa yang cermat terutama mengenai potensi, situasi dan perkembangan ekonomi daerah. Meskipun diketahui bahwa penentuan target sangat penting sebagai landasan menyusun program kerja, namun hendaknya target yang ditetapkan tersebut harus realistis sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Jika melihat data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu yang tergambar dari laju pertumbuhan PDRB, maka seyogyanya penentuan target PAD dapat lebih cermat diprediksi karena perkembangan perekonomian berjalan normal bahkan rata-rata pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan per tahunnya.

Pendapatan PAD terutama yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi, saat ini kontribusinya tercatat masih sangat kecil. Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi sebenarnya dapat dilakukan baik melalui upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Yang dimaksud dengan intensifikasi adalah upaya peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap besaran pungutan dari setiap jenis pajak dan retribusi yang telah ada serta mengefektifkan metode atau cara pemungutannya. Sedangkan upaya ekstensifikasi dapat dilakukan melalui perluasan berbagai jenis pungutan terutama dari aktivitas ekonomi produktif yang sudah ada tetapi belum diolah.

Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi sebenarnya disebabkan karena potensi perekonomian daerah belum berkembang. Sumber penerimaan pajak yang kontribusinya relatif lebih besar selama ini hanya berasal dari pajak-pajak reklame, pajak hotel serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Sedangkan penerimaan dari jenis retribusi yang kontribusinya relatif besar/stabil dan kontinyu selama 5 tahun terakhir diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi administrasi KTP dan KK, surat jalan dan akte kelahiran, izin pengelolaan sarang burung walet, retribusi IMB, parkir dan retribusi pelayanan pasar.

Pajak restoran, hotel dan hiburan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sementara pajak penerangan jalan, reklame dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C cenderung semakin menurun bahkan ada yang tidak tercatat sama sekali pada setahun terakhir. Adanya data nihil yang ditunjukkan dalam tabulasi tersebut jelas mengundang pertanyaan yang cukup besar, apakah memang sama sekali tidak ada pungutan atau memang ada pungutan namun tidak disetorkan. Hal sama terlihat pada penerimaan hasil retribusi yang pada beberapa jenis pungutan tidak tercantum besaran angkanya, dimana pada periode 5 tahun sebelumnya sebagian besar jenis retribusi tersebut memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penerimaan PAD Kabupaten Kapuas Hulu.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa adanya penurunan potensi sumber-sumber PAD, baik pajak, retribusi dan dari jenis-jenis sumber PAD lainnya tentunya akan mempersulit dalam penetapan target penerimaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya jumlah realisasi penerimaan setiap tahunnya. Belum optimalnya pengidentifikasian secara akurat terhadap potensi sumber-sumber PAD cenderung menjadi kendala dalam upaya peningkatan penerimaan PAD selama periode 5 tahun terakhir. Sebagai contoh, potensi pajak dari

---

pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, sebenarnya belum dapat diidentifikasi secara maksimal padahal dengan potensi kandungan yang diperkirakan sangat tinggi diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah Kapuas Hulu. Beberapa alasan yang dikemukakan atas kendala pengidentifikasian tersebut diantaranya adalah karena faktor wilayah/lokasi pertambangan berikut kandungannya masih belum dipastikan dan ditetapkan, kemudian beberapa jenis bahan galian seperti batu, pasir dan tanah merah senantiasa pengambilannya dilakukan berpindah-pindah dan sangat sulit diawasi serta adanya pengambilan bahan galian baik oleh masyarakat maupun pengusaha yang dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur yang terkait dengan pelayanan pemerintah. Akibat adanya kendala-kendala tersebut, penetapan target penerimaan yang dijalankan saat ini pun akhirnya masih bertumpu dan didasarkan pada volume pemakaian bahan galian yang bersangkutan dimana proyek-proyek dilaksanakan melalui anggaran APBD saja. Oleh karena itu, untuk perencanaan kedepan seyogyanya dan perlu dilaksanakan beberapa upaya yang optimal dalam rangka peningkatan penerimaan khususnya dari jenis pajak ini, yakni diantaranya melalui upaya-upaya penetapan wilayah/lokasi pertambangan berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, penertiban pengangkutan dengan pengadaan pos-pos pengawasan serta melalui upaya penertiban terhadap izin-izin penimbunan. Contoh lainnya, berkenaan dengan pajak hotel dapat dikemukakan juga bahwa meskipun saat ini dari segi jumlah mengalami peningkatan potensi dan realisasinya namun penetapan pajak hotel saat ini masih dilakukan secara *office assisment* berdasarkan kesanggupan pemilik, sehingga untuk lebih meningkatkan penerimaan dari pajak hotel di masa-masa yang akan datang perlu kiranya dalam pemungutannya dilakukan berdasarkan jumlah penghuni dan layanan yang menjadi objek pajak yang bersangkutan.

Melihat fenomena tersebut di atas, jelas dibutuhkan kajian lebih mendalam perihal perencanaan dan sistem pungutan yang selama ini telah diberlakukan. Tidak menutup kemungkinan, faktor sumberdaya manusia yang berperan penting dalam hal cara pemungutannya harus dikaji pula melalui upaya kontrol serta pemberdayaan tingkat kualitas pelayanannya, agar munculnya pungutan-pungutan liar ataupun penyimpangan dan penyelewengan terhadap dana yang dipungut dapat ditekan bahkan dihilangkan sama sekali. Disamping itu, dari pihak pemerintah perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan koordinasi seluruh unit-unit terkait terutama dalam rangka menyatukan persepsi dan keterpaduan langkah penanganannya, penetapan jadwal operasi sisir yang terpadu dan berkesinambungan, baik dalam pendataan maupun pemungutannya serta yang tak kalah pentingnya langkah pemerintah yang perlu diperhatikan saat ini adalah penjadwalan kegiatan sosialisasi terhadap beberapa jenis pajak ataupun retribusi baik yang baru maupun yang telah ditetapkan dasar hukumnya kepada masyarakat luas sehingga diharapkan masyarakat nantinya akan mengetahui dan menjadi lebih sadar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pemungutan pajak dan retribusi yang pada intinya juga untuk kepentingan pembangunan daerah seutuhnya.

Prospek penerimaan PAD dalam waktu jangka pendek melalui usaha intensifikasi dapat ditempuh dengan cara peninjauan ulang tentang sistem dan besaran nilai pungutan pajak dan retribusi yang diberlakukan. Dengan perkembangan laju inflasi rata-rata 7-8 persen per tahun, besaran nilai pungutan yang ditinjau hingga 20-25% masih dalam koridor yang wajar. Namun peninjauan ini juga sepatutnya sinkronisasi dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke arah yang lebih baik dan seoptimal mungkin pengalokasian sebagian besar hasil pungutan tersebut nantinya ditujukan atau digunakan untuk pembiayaan program-program pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan dan kompensasi yang adil antara beban yang ditanggung masyarakat dengan manfaat yang diperolehnya, dimana pada akhirnya diharapkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dapat tercapai serta terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama secara berkesinambungan.

Sementara itu, program atau usaha ekstensifikasi, dalam jangka pendek dan jangka panjang, dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan jenis penerimaan pajak dan retribusi. Beberapa sumber PAD yang potensial yang sebenarnya beberapa tahun silam sempat terdata dan direalisasikan, merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dihidupkan kembali, seperti retribusi penimbunan kayu, retribusi ijin usaha pengambilan sarang walet, serta retribusi dinas-dinas sektoral dan lainnya. Khususnya retribusi penimbunan kayu dan sarang walet,

---

sebenarnya sejak lama Kabupaten Kapuas Hulu diketahui memiliki potensi cukup besar terhadap kedua sumberdaya tersebut. Sedangkan jenis pungutan lain yang potensial untuk dikembangkan diantaranya adalah retribusi pelepasan ikan, pemeriksaan ikan asin atau retribusi atas pengeluaran hasil-hasil pertanian umum. Melalui kajian ulang dan penyelenggaraan sistem serta organisasi operasional yang lebih baik, diyakini potensi-potensi sumber pendapatan tersebut dapat digali dan dikembangkan lebih maksimal.

Di bidang investasi, Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2004 tercatat masih minim, baik dalam hal kuantitas maupun nilai realisasinya, terutama investasi yang berasal dari proyek-proyek Penanam Modal Asing (PMA). Pada tahun 2004, dari 4 (empat) rencana proyek PMA yang bernilai US\$ 40.324.000,48 baru terealisasi satu proyek dengan nilai US\$ 500.000. Namun demikian, jika melihat kondisi perekonomian nasional hingga saat ini yang masih belum pulih benar, pada dasarnya kegiatan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan telah menunjukkan pergerakan yang positif ke arah kemajuan. Jika diakumulasi dari tahun 2000 hingga 2005, tercatat sudah tiga proyek PMA/PMDN yang telah disetujui dan berinvestasi aktif, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai luasan hingga 58.000 Ha (target) dan 14.000 Ha (sudah terealisasi) yang tersebar di tiga lokasi / wilayah kecamatan, yakni masing-masing berlokasi di Puring Kencana, Silat Hilir dan Semitau. Perkembangan penanaman modal dalam 5 (lima) tahun ini jelas menggambarkan mulai adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

Jika melihat potensi sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi lahan, sungai, hutan wisata, pertambangan dan hasil-hasil pertanian, jelas proyeksi dan peluang investasi asing maupun dalam negeri pada tahun-tahun mendatang cukup terbuka lebar dan menjanjikan dalam pengembangannya, asalkan sistem manajemen dan pengelolaan benar-benar dilaksanakan secara cermat dan bijaksana sehingga iklim investasi yang berkembang nantinya benar-benar mencerminkan nilai-nilai ekonomis yang menguntungkan, terintegrasi dengan berbagai kepentingan serta tetap berwawasan kelestarian terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kapuas Hulu dengan tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan, dapat direalisasikan salah satunya melalui promosi peningkatan investasi serta pembinaan dan pengembangan kebijakan investasi. Arah kebijakan dan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendataan secara optimal dan integral terlebih dahulu mengenai peluang usaha yang dapat menarik investor menanamkan modalnya, selanjutnya melaksanakan promosi melalui rapat-rapat koordinasi atau penerbitan brosur yang memuat prosedur, syarat dan mekanisme serta peluang investasi termasuk melakukan reformasi dibidang pelayanan perijinan. Sementara dalam upaya pembinaan dapat dilakukan melalui sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal secara keseluruhan. Pada akhirnya dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan terjamin keberadaannya, baik terjamin keamanan maupun kepastian hukumnya, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami peningkatan sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor investasi.

Mengingat perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu masih bertumpu pada hasil sektor pertanian, maka program pertanian yang perlu dikembangkan sebagai lahan investasi dan menarik investor saat ini adalah program pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Pengembangan sektor ini cukup potensial bagi peningkatan penerimaan daerah yang dimungkinkan jika sektor transportasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung aksesibilitas juga dikembangkan secara optimal. Luasnya areal kelapa sawit, karet ataupun komoditas pertanian/perkebunan rakyat lainnya yang belum memproduksi maksimal sangat didukung dengan keberadaan jalur perhubungan lintas Selatan dan Utara saat ini yang memungkinkan proses distribusi dan pemasaran berbagai komoditi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan bernilai ekonomis bagi rakyat. Disamping itu, dengan adanya infrastruktur tersebut juga cukup menunjang pengembangan sumber pendapatan lain khususnya disektor pariwisata, dimana pertumbuhan kunjungan wisata berpeluang meningkat jika melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup menjanjikan diantaranya potensi wisata alam dengan obyek wisata yang sudah sangat terkenal yakni Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun.

---

Dalam jangka panjang, prospek penerimaan PAD sebenarnya berpeluang untuk semakin meningkat apabila proses dan perkembangan pembangunan berjalan dengan baik. Pembangunan dibidang pertanian misalnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan tersedia khususnya pada sub sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan. Demikian juga termasuk pembangunan bidang lainnya akan lebih cepat berkembang dengan dukungan pembangunan dibidang infrastruktur. Perekonomian desa akan menjadi hidup karena hasil-hasil produksi masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan adanya sarana transportasi yang memadai. Disamping itu, pembangunan dibidang kesejahteraan sosial turut pula berperan dalam upaya pencapaian tingkat pendapatan daerah yang semakin baik. Peningkatan dan perluasan pendidikan, pelayanan kesehatan serta peningkatan gizi masyarakat akan membentuk manusia yang lebih berkualitas yang pada gilirannya mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga sangat menunjang laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pembangunan yang berkelanjutan akan berkembang dari mikro ke makro sehingga kegiatan ekonomi produktif semakin luas. Pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif merupakan sumber pemungutan pajak dan retribusi. Prospek pembangunan yang cerah dimasa mendatang akan berkorelasi positif dengan prospek penerimaan PAD yang semakin besar.

## **B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Dalam kondisi keterbatasan sumber pendapatan daerah, maka kebijakan belanja daerah seyogyanya mengedepankan prinsip hemat, efisien, efektif, tepat guna dan tepat sasaran melalui rasionalisme terhadap kebutuhan riil dengan tetap bercermin pada kualitas pelayanan yang telah dan akan diberikan kepada masyarakat serta tetap bijak dan disiplin dalam penggunaan dana yang tersedia, yang diantaranya lebih mengutamakan pembiayaan pada sektor atau program prioritas pembangunan yang memacu pertumbuhan ekonomi rakyat dan yang langsung terfokus pada aspek pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan prinsip dan acuan dasar tersebut, program pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan, pelatihan dan kesehatan serta pembangunan dan pengembangan sektor-sektor vital dan potensial lainnya, perlu dijadikan prioritas utama dengan sasaran yang berorientasi pada pencapaian tingkat kualitas sumberdaya manusia yang optimal, pendayagunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang positif, terjaminnya kelangsungan pemerintahan yang berjalan mantap, mandiri dan demokratis, serta terwujudnya kesatuan, persatuan dan kerukunan serta kesejahteraan masyarakat, yang berkelanjutan, adil dan makmur.

### **B.1. ANALISIS BELANJA DAERAH**

Pada periode tahun anggaran 2000-2004, kebijakan penyusunan APBD sebagian diarahkan untuk mengatasi berbagai krisis sosial, ekonomi dan politik yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan/proyek, baik yang bersifat penanggulangan maupun untuk pemulihan. Optimalisasi anggaran belanja rutin diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui kebijakan efisiensi belanja rutin non pegawai dengan cara memprioritaskan pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgent, pemeliharaan hasil pembangunan serta kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara belanja pembangunan mengacu pada program-program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok reformasi pembangunan daerah serta diarahkan pada pencapaian visi dan misi seperti yang tertuang dalam program pembangunan daerah (Propeda) dan rencana strategis daerah (Renstrada) Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengacu pada dokumen-dokumen tersebut, dalam hal ini analisa terhadap realisasi belanja daerah dibagi menjadi 2 periode penggunaan belanja, yakni periode tahun anggaran 2000-2002 dan periode tahun 2003-2004.

Penggunaan belanja rutin selama periode 2000-2002 mencapai Rp 237,32 miliar atau 58,08% dari total belanja sebesar Rp 408,57 miliar, dimana terjadi peningkatan rata-rata penggunaan pertahunnya sebesar 187,15% dengan peningkatan penggunaan belanja rutin terbanyak terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar 233,03% dari belanja rutin tahun 2000. Sedangkan penggunaan belanja pembangunan mencapai Rp 171,25 miliar atau 41,92% dari total belanja sebesar Rp 408,57 miliar dengan penggunaan pertahunnya rata-rata sebesar 176,03%. Sedangkan peningkatan penggunaan anggaran Belanja Pembangunan terbesar terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar 213,50% dibandingkan dengan penggunaan belanja pembangunan pada tahun 2000.

Penyebab tingginya penggunaan belanja rutin dan belanja pembangunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah karena adanya pengalihan pembiayaan dan pengeluaran dana anggaran Belanja Rutin bagi instansi vertikal eks departemen yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, disamping adanya waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2000 yang hanya berlangsung 9 bulan.

Realisasi penggunaan belanja pembangunan pada periode tahun 2000 hingga tahun 2002 sebesar Rp 171,25 miliar atau 89,10% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 192,20 miliar, dimana penyebarannya meliputi seluruh sektor pembangunan, 95 sub sektor, 153 program dan 338 kegiatan proyek.

Tabel : 79  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENGELUARAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2000 - 2004**

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH / REALISASI ( x Rp 1.000 )				
		2000	2001	2002	2003	2004
<b>A</b>	<b>PENGELUARAN RUTIN</b>	<b>35.836.100</b>	<b>83.510.610</b>	<b>117.968.506</b>	<b>177.853.123</b>	<b>205.312.768</b>
	1. Belanja Pegawai	27.082.702	59.170.518	65.193.425	92.604.014	103.287.156
	2. Belanja Barang	5.447.804	9.697.979	16.912.072	30.904.176	40.433.114
	3. Belanja Pemeliharaan	640.024	1.502.931	4.273.329	23.216.578	26.130.318
	4. Belanja Perjalanan Dinas	1.410.047	3.315.824	5.699.314	12.314.075	12.205.662
	5. Belanja Lain-Lain	0	5.103.079	16.198.092	0	0
	6. Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	44.084	198.738	0	0	0
	7. Pensiunan / Bantuan dan Onderstand	0	0	0	0	0
	8. Ganjaran / Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	709.567	2.044.440	2.130.360	15.746.482	20.286.518
	9. Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain	229.590	1.472.452	5.467.643	0	0
	10. Pengeluaran Tidak Tersangka	272.283	1.004.650	2.094.271	3.067.798	2.970.000
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN MODAL / PEMBANGUNAN</b>	<b>28.104.562</b>	<b>60.003.256</b>	<b>83.144.558</b>	<b>87.774.328</b>	<b>45.939.329</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.940.662</b>	<b>143.513.866</b>	<b>201.113.064</b>	<b>265.627.451</b>	<b>251.252.097</b>

Sumber : LPA Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2000-2005

Ditinjau dari sisi pengeluaran, maka total realisasi belanja pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 63,94 miliar dimana pada tahun 2001 meningkat sebesar 224,45% menjadi Rp 143,51 miliar. Realisasi belanja tersebut meningkat menjadi Rp 201,11 miliar atau meningkat sebesar 140,13% pada tahun 2002, sehingga dalam periode 2000-2002 penggunaan total belanja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 182,29% pertahunnya.

Tabel : 80

**PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2000-2002**

NO	TAHUN	BELANJA RUTIN ( Rp )	LAJU PERTUMBUHAN BELANJA RUTIN ( % )	BELANJA PEMBANGUNAN ( Rp )	LAJU PERTUMBUHAN BELANJA PEMBANGUNAN ( % )	TOTAL BELANJA ( Rp )	LAJU PERTUMBUHAN TOTAL BELANJA ( % )
1	2000	35.836.099.873,00	-	28.104.562.179,00	-	63.940.662.052,00	-
2	2001	83.510.610.228,66	133,03	60.003.255.978,34	113,50	143.513.866.207,00	124,45
3	2002	117.968.506.118,00	41,26	83.144.557.980,00	38,57	201.113.064.098,00	40,13
JUMLAH / RATA-RATA		237.315.216.219,66	87,15	171.252.376.137,34	76,03	408.567.592.357,00	82,29

Sumber : Data Olahan, LPA Kepala Daerah dan Profil PAD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Sementara untuk tahun anggaran 2003-2004, khususnya penggunaan belanja pembangunan tidak lagi disajikan secara sektor dan sub sektor, tetapi disajikan melalui bidang-bidang terkait. Adapun realisasi penggunaan belanja pembangunan pada tahun 2003 sebesar Rp 87,43 miliar atau 96,14% dari jumlah yang dianggarkan yakni sebesar Rp 91,297 miliar, dimana penyebarannya meliputi 10 bidang pembangunan, 83 program dan 181 kegiatan proyek. Sedangkan untuk tahun 2004, realisasi penggunaan belanja pembangunan tercatat sebesar Rp 45,94 miliar atau 66,15% dari jumlah yang dianggarkan yakni sebesar Rp 69,45 miliar. Adapun secara keseluruhan, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2003 adalah sebesar Rp 265,63 miliar atau mencapai 97,17% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 273,35 miliar. Sedangkan pada tahun 2004 realisasinya adalah sebesar Rp 251,25 miliar atau mencapai 89,94% dari plafon belanja daerah tahun 2004 yang sebesar Rp 279,37 miliar.

Secara umum, perkembangan anggaran dan realisasi belanja pembangunan daerah Kapuas Hulu selama periode lima tahun terakhir menunjukkan pencapaian angka realisasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan total belanja yang dianggarkan. Dari total Rp 1 triliun yang dianggarkan untuk belanja daerah selama periode 2000-2004, ternyata hampir 92,5% terealisasi untuk belanja rutin dan belanja modal / pembangunan daerah yakni sebesar Rp 925,45 miliar. Adapun penggunaan belanja daerah yang terbesar, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 101,73% dari belanja total yang dianggarkan. Angka ini menunjukkan terjadi defisit anggaran belanja sebesar 1,73% atau senilai Rp 1,09 miliar pada tahun tersebut yang lebih spesifik lagi terjadi pada pembelanjaan rutin yang mengalami defisit Rp 1,71 miliar atau 5,01% dari total belanja rutin yang dianggarkan. Namun secara keseluruhan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Kapuas Hulu mengalami surplus anggaran belanja sebesar Rp 74,93 miliar.

**Tabel : 81**  
**REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2000 - 2004**

NO	URAIAN	TAHUN					JUMLAH
		2000	2001	2002	2003	2004	
<b>BELANJA RUTIN</b>							
1	Anggaran Belanja Rutin ( x Rp 1.000,- )	34.127.126	86.185.335	135.136.777	182.056.763	209.918.487	<b>647.424.488</b>
2	Realisasi Belanja ( x Rp 1.000,- )	35.836.100	83.510.610	117.968.506	177.853.123	205.312.768	<b>620.481.107</b>
3	Persentase (%)	105,01	96,90	87,30	97,69	97,81	<b>95,84</b>
4	Sisa Anggaran ( x Rp 1.000,- )	-1.708.974	2.674.724	17.168.271	4.203.640	4.605.719	<b>26.943.381</b>
<b>BELANJA MODAL / PEMBANGUNAN</b>							
1	Anggaran Belanja Modal / Pembangunan ( x Rp 1.000,- )	28.726.310	74.478.807	88.998.161	91.297.391	69.449.650	<b>352.950.320</b>
2	Realisasi Belanja ( x Rp 1.000,- )	28.104.562	60.003.256	83.144.558	87.774.328	45.939.329	<b>304.966.034</b>
3	Persentase (%)	97,84	80,56	93,42	96,14	66,15	<b>86,40</b>
4	Sisa Anggaran ( x Rp 1.000,- )	621.748	14.475.551	5.853.603	3.523.064	23.510.321	<b>47.984.286</b>
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>							
1	Anggaran Belanja Total ( x Rp 1.000,- )	62.853.437	160.664.142	224.134.938	273.354.155	279.368.137	<b>1.000.374.808</b>
2	Realisasi Belanja ( x Rp 1.000,- )	63.940.662	143.513.866	201.113.064	265.627.451	251.252.097	<b>925.447.141</b>
3	Persentase (%)	101,73	89,33	89,73	97,17	89,94	<b>92,51</b>
4	Sisa Anggaran ( x Rp 1.000,- )	-1.087.226	17.150.276	23.021.873	7.726.704	28.116.039	<b>74.927.667</b>

Sumber : Data Olahan, Profil PAD dan LPA Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

## B.2. PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2005-2010

Laju pertumbuhan Belanja Daerah merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya arus pengeluaran keuangan yang dianggarkan oleh daerah bersangkutan dari sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Selama tahun 2000-2004, kondisi pertumbuhan pembelanjaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada **tabel 82**. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rekapitulasi belanja daerah selama periode lima tahun terakhir, secara riil diperoleh gambaran mengenai tingkat pertumbuhan belanja daerah, dimana pada tahun 2000 tingkat atau laju pertumbuhan belanja daerah Kapuas Hulu sebesar 39,83% meningkat dari tahun anggaran sebelumnya dan pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 5,41% dibanding tahun 2003 sebelumnya. Namun secara keseluruhan selama periode 2000-2004 pertumbuhan pembelanjaan daerah Kapuas Hulu meningkat pertahunnya yakni rata-rata 46,22%

**Tabel : 82**  
**LAJU PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2000-2004**

NO	TAHUN	BELANJA DAERAH					
		BELANJA RUTIN (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	BELANJA MODAL / PEMBANGUNAN (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	TOTAL BELANJA (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
1	2000	35.836.099.873,00	37,00	28.104.562.179,00	44,36	63.940.662.052,00	39,83
2	2001	83.510.610.228,66	133,03	60.003.255.978,34	113,50	143.513.866.207,00	124,45
3	2002	117.968.506.118,00	41,26	83.144.557.980,00	38,57	201.113.064.098,00	40,13
4	2003	177.853.123.220,00	50,76	87.774.327.938,00	5,57	265.627.451.157,57	32,08
5	2004	205.312.767.675,00	15,44	45.939.329.454,00	-47,66	251.252.097.129,00	-5,41
<b>RATA-RATA</b>		<b>124.096.221.422,93</b>	<b>55,50</b>	<b>60.993.206.705,87</b>	<b>30,87</b>	<b>185.089.428.128,71</b>	<b>46,22</b>

Sumber : Data Olahan, Profil PAD dan LPA Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2001-2004

Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada **tabel 83**, dapat diproyeksikan laju pertumbuhan belanja daerah untuk 5 (tahun) mendatang (2005-2010), dimana angka-angka yang diproyeksikan tersebut hanya sebatas perkiraan atau target menyeimbangkan terhadap pengelolaan APBD khususnya dalam penetapan anggaran belanja daerah secara optimal sebagaimana yang juga digariskan dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan yakni pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan alokatif.

**Tabel : 83**  
**TARGET / PROYEKSI PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2005-2010**

NO	TAHUN	PROYEKSI BELANJA DAERAH					
		BELANJA APARATUR (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	BELANJA PUBLIK / PEMBANGUNAN (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	TOTAL BELANJA (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
	2004	205.312.767.675,00	15,44	45.939.329.454,00	-47,66	251.252.097.129,00	-5,41
1	2005	159.527.366.227,70	-22,30	125.988.832.682,84	174,25	285.516.198.910,53	13,64
2	2006	205.814.762.310,70	29,02	224.431.361.299,98	78,14	430.246.123.610,68	50,69
3	2007	215.052.526.977,19	4,49	250.762.022.036,03	11,73	465.814.549.013,22	8,27
4	2008	225.641.501.063,97	4,92	265.741.165.508,38	5,97	491.382.666.572,35	5,49
5	2009	235.741.084.334,45	4,48	319.991.002.500,70	20,41	555.732.086.835,14	13,10
6	2010	240.979.858.050,77	2,22	360.865.001.536,91	12,77	601.844.859.587,68	8,30
<b>RATA-RATA</b>		<b>173.629.540.152,33</b>	<b>3,80</b>	<b>197.819.064.004,66</b>	<b>50,55</b>	<b>371.448.604.156,99</b>	<b>16,58</b>

### C. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN KEUANGAN DAERAH

Penetapan kebijakan umum keuangan dan anggaran daerah diarahkan pada terpeliharanya stabilitas ekonomi daerah yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan berkualitas serta diarahkan pula pada upaya peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang hati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan keuangan daerah dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode tahun 2005-2010 diarahkan pada :

- 
1. **Menyeimbangkan antara Peningkatan Alokasi Anggaran dengan Upaya untuk Memantapkan Kestinambungan Fiskal**, melalui peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran secara bertahap
  2. **Peningkatan Pengelolaan Sumber-Sumber Pinjaman, Arus Modal dan Investasi** yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman yang tidak saja relatif terhadap PDRB tetapi juga secara absolut melalui peningkatan efektifitas arus penggunaan pinjaman sebagai modal berdaya guna, penganekaragaman sumber pinjaman, penyempurnaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang cermat, tingkat suku bunga dan jatuh tempo pelunasan, pemberian jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi yang ditunjang oleh pengembangan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang memadai serta kebijakan/peraturan yang konsisten.
  3. **Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Penyaluran Dana Masyarakat** yang diarahkan pada optimalisasi peranan perbankan dan jasa non keuangan dalam penyaluran kredit termasuk peningkatan akses permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  4. **Peningkatan Ketahanan Sektor Keuangan Daerah**, melalui implementasi sistem keuangan yang sehat, mantap, stabil, efisien serta terkoordinasi guna mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan, penyempurnaan sistem informasi dan *data base* yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal serta peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD.
  5. **Peningkatan Pengelolaan dan Manajemen yang Terkait dengan Neraca Pembayaran**, yang diarahkan pada pengembangan komoditi unggulan daerah melalui peningkatan mutu dan daya saing, diversifikasi dan nilai tambah serta peningkatan kerjasama perdagangan sektoran dan regional.
  6. **Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**, yang diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan sistem dan jabatan fungsional pembendaharaan, penyajian informasi pembendaharaan daerah secara berkala atau non berkala, penyusunan pedoman dan penyajian statistik keuangan daerah, percepatan penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah serta penyempurnaan sistem akuntansi yang standar.
  7. **Peningkatan Sumber Daya Aparatur Keuangan**, melalui peningkatan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme khususnya dalam kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan praktis dan teknologi tepat guna.

### **C.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka operasionalisasi misi-misi pembangunan daerah yang telah dicanangkan sebelumnya, selanjutnya perlu kiranya dilaksanakan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan penerimaan daerah berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah selama periode lima tahun kedepan. Melalui strategi dan upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, diharapkan nantinya membawa perbaikan secara menyeluruh pada masing-masing elemen sistem dan prosedur pendapatan daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan daerah secara signifikan.

Selanjutnya berkaitan dengan strategi pengelolaan penerimaan daerah yang telah diuraikan di atas, maka untuk mencapai sasaran yang diharapkan, prioritas dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2005-2010 diletakkan pada :

1. **Pengembangan dan Peningkatan Penerimaan Daerah Terutama Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dengan kebijakan yang diarahkan pada reformasi pengelolaan dan administrasi sumber-sumber pendapatan asli daerah serta optimalisasi penerimaan daerah lainnya selain PAD baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya, penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial, peningkatan program kerjasama dengan pihak ketiga seperti investor dan unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta unit-unit penghasil, penyesuaian peraturan daerah yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

- 
2. **Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Khususnya Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah serta Optimalisasi Sumberdaya Alam**, dengan kebijakan yang diarahkan pada pengembangan program pendidikan dan latihan khususnya di bidang keuangan dan akuntansi, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan aparatur serta peningkatan pendidikan mental dan kinerja SDM. Sedangkan optimalisasi sumberdaya alam dapat dilakukan melalui pencegahan pencurian terhadap sumberdaya perairan, hutan dan sumberdaya mineral.
  3. **Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pungutan Daerah, seperti Pajak, Retribusi dan Pungutan Daerah Lainnya yang Sah**, dengan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kinerja pemungutan, penyederhanaan, penyempurnaan sistem dan prosedur serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penegakan sanksi hukum bagi para penghindar wajib pajak, peningkatan pengelolaan dan pelayanan PBB, pajak pusat lainnya dan sumber-sumber penerimaan non pajak atau pajak propinsi dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil.

## **C.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Penetapan dan optimalisasi kebijakan belanja, pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang saat ini masih terasa sejak terjadinya krisis sosial, moneter dan politik sehingga diharapkan dalam perkembangannya tidak saja mampu bersifat penanggulangan akan tetapi lebih jauh lagi dapat bersifat pemulihan kearah kondisi perekonomian yang kembali stabil.

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan, prioritas dan arah kebijakan belanja daerah tahun 2005-2010 diletakkan pada :

1. **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengeluaran atau Belanja Daerah**, terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran diantaranya dengan realokasi belanja daerah berdasarkan skala prioritas sehingga lebih terarah dan tepat sasaran serta benar-benar menjamin hasil berupa pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat luas
2. **Penyusunan Anggaran Belanja yang Alokatif dan Distributif serta Optimalisasi Pengeluaran Keuangan Daerah**, dengan kebijakan yang diarahkan pada perencanaan anggaran yang disamping berorientasi pada skala prioritas pembangunan juga berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang merata dan adil bagi segenap masyarakat, disiplin dan tertib penyusunan anggaran belanja yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, pengendalian belanja daerah khususnya terhadap pos pengeluaran rutin.
3. **Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Belanja Daerah**, melalui pengembangan program pendidikan, penelitian dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis fungsional, manajerial dan struktural untuk menghasilkan aparatur yang mampu merespon tuntutan dan keinginan masyarakat terkait dengan tanggung jawab yang diemban dalam pengalokasian dana pembangunan daerah.

## **C.3. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagai implementasi arah kebijakan umum keuangan daerah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, beberapa program dan indikasi kegiatan umum pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Kapuas Hulu untuk periode anggaran tahun 2005-2010, yakni sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama penerimaan yang bersumber dari PAD dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah termasuk didalamnya perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat.

---

Indikasi Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan pada dasarnya berupa Reformasi Kebijakan, Pengelolaan dan Administrasi, yakni meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan administrasi keuangan
- b. Membentuk dan menyempurnakan bank data atau data statistik yang *up to date*
- c. Mengumpulkan dan validasi data pendapatan untuk menjaring sumber-sumber pendapatan baru
- d. Melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan peningkatan pendapatan asli daerah baik dari pajak maupun retribusi dengan tetap berpegang pada prinsip kesesuaian dan keadilan
- e. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari APBD/APBN termasuk peraturan daerah yang terkait dengan upaya perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah.
- f. Melaksanakan pemeriksaan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggar wajib pajak untuk menjamin tingkat kepatuhan
- g. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak melalui penyempurnaan Sistem Informasi Pajak dan kinerja penyuluhan sebagai pusat informasi.
- h. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga seperti perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak/retribusi.
- i. Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak dan sistem manajemen sumberdaya manusia (SDM) serta pelaksanaan "*good governance*" di lingkungan kepegawaian pemerintah terkait yang lebih profesional dan terintegrasi dengan kode etik yang ditetapkan.
- j. Pembangunan dan penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak
- k. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi Penerimaan Daerah Hasil Pajak / Bukan Pajak
- l. Meningkatkan pengelolaan dari penerimaan pinjaman, sumbangan dan bantuan secara mantap serta optimal dan efektif dalam penggunaan dan pengawasannya melalui pengkajian terhadap kebijakan ataupun peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman/bantuan.

## **2. Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran dan Belanja Daerah**

Program ini bertujuan untuk mendukung langkah konsolidasi keuangan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal serta menjamin jumlah belanja daerah berada dalam batas-batas kapasitas fiskal.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, Indikasi Kegiatan Pokok yang akan ditempuh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Penyusunan anggaran belanja daerah dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah dan berbasis kinerja
- b. Penyesuaian pendapatan dan perbaikan kesejahteraan aparatur negara (PNS) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta pemeliharaan aset-aset negara/daerah.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai dan tepat guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran.
- e. Mengurangi beban pembayaran hutang dan bunga atas pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.
- f. Mengarahkan pemberian subsidi yang tepat sasaran

- 
- g. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang tepat sasaran sehingga dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin ataupun masyarakat yang tertimpa bencana.
  - h. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi pusat dalam perumusan dan penetapan anggaran perimbangan
  - i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan / belanja daerah
  - j. Perbaiki manajemen keuangan daerah yang terkait dengan upaya pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah
  - k. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia pengelola keuangan daerah (bendahara daerah dan pengelola pinjaman/utang)